



# Infrastruktur Malioboro

## Belum Siap

**JOGJA**—Rencana Malioboro menjadi kawasan pedestrian yang akan diuji coba pada Selasa (18/6) dinilai terlalu dipaksakan.

*Uli Febriani, Hertambang Jati Kusumo & Lugas Subarkah  
 redaksi@harianjogja.com*

Infrastruktur penunjang seperti kantong parkir dinilai belum siap. Padahal, kantong-kantong parkir sangat diperlukan untuk menunjang kebijakan itu.

Terlalu memaksakan, tidak tahu yang dikejar apa. Padahal yang mau dibangun banyak, kantong parkir, pedagang di kawasan pedestrian untuk pejalan kaki. Tertibkan dulu, jangan tambah-nambah dulu program. Kami juga sebelumnya tidak pernah diajak bicara, tahu-tahu sudah mau uji coba. Kenapa tidak mau menerima masukan terlebih dahulu," ucap Sekretaris Perkumpulan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY), Yulianto, Jumat (14/6).

Bukan tanpa alasan PPMAY menilai konsep Malioboro bebas kendaraan tidak siap. Sejumlah pelaku usaha di Malioboro itu menyoroti pemerintah daerah yang tidak menerima masukan dari pelaku usaha dan warga di kawasan Malioboro terlebih dahulu, sebelum adanya uji coba.

Kantong parkir dinilai belum memadai saat ini. Hal tersebut dinilai perlu disiapkan terlebih dahulu. Dicontohkannya bagaimana nantinya jika ada yang ingin membeli barang kebutuhan seperti di Liman yang menjual kebutuhan perlengkapan rumah seperti karpet. Jika parkir di Abu Bakar Ali, tentu cukup menyulitkan. Perlu dipikirkan juga apa ada *shuttle* yang dapat mempermudah akses wisatawan.

Dikhawatirkannya rencana Malioboro bebas kendaraan, justru membuat kawasan penyangga sekitar Malioboro menjadi macet, sehingga wisatawan justru enggan untuk berkunjung ke Malioboro.

"Di kawasan ini juga ada SMP Stella Duce, tidak terbayangkan macetnya kalau pas buaran sekolah berbarengan dengan stasiun juga penumpang turun," katanya.

Jalan-jalan sirip penunjang Malioboro dirasa juga belum siap, lantaran terlalu sempit dan banyak aktivitas pedagang di sana, yang seharusnya ditata terlebih dahulu. Juga pedagang yang ada di kawasan pedestrian yang telah dibangun seharusnya terlebih dahulu ditata.

La khawatir kebijakan yang tidak menerima masukan dari para pelaku usaha, justru akan merugikan pengusaha dan membuat omzet mereka menurun. Dicontohkannya saat larangan pengunjung parkir di kawasan Malioboro dulu, pendapatan pengusaha menurun. Beberapa karyawan juga terpaksa di PHK. Termasuk di tempatnya yang semula ada 13 karyawan kini hanya ada empat.

"Pemerintah jangan nggampangke. Mereka mengatakan pengunjung tetap ramai. Apa sudah disurvei ke pengusaha. Apa sudah turun sampai 60 persen. Sehingga Mall Malioboro mengambil kebijakan sepeda motor boleh parkir di bawah kan. Pengusaha yang lain juga turun omzetnya sejak itu," ucapnya.

Menurutnya para pengusaha juga menyumbang untuk membuka lapangan pekerjaan yang banyak.

► Halaman 6

Instansi		
1. UPT Malioboro		
2. Dit. Perhubungan		
3. ....		
4. ....		
5. ....		
✓ Netral		
✓ Biasa		

### Infrastruktur Malioboro...

Oleh karenanya hal tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Selain itu, pemilihan hari uji coba dinilai juga tidak tepat. Lantaran pada Selasa Wage tersebut, tidak ada PKL yang berjualan. Sehingga tidak mencerminkan jika nanti kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

Senada disampaikan Kapolresta Jogja, Kombes Pol Armaini. Ia mengimbau agar Pemkot segera menyiapkan kantong parkir tambahan. Armaini mengaku pernah mengusulkan kepada Wali Kota Jogja untuk menjadikan Stadion Kridosono sebagai kantong parkir. Ia mempertimbangkan stadion ini sudah tidak layak untuk helatan olahraga maupun pertunjukan musik. "Sudah tidak representatif, tidak punya tempat parkir pula [Stadion Kridosono], lebih baik jadi kantong parkir saja," ungkapnya.

Dengan demikian ia menyebutkan rencana ini bisa memberdayakan becak dan andong. Sebab jarak dari Stadion Kridosono ke Malioboro cukup jauh, becak dan andong bisa menjadi kendaraan penghubung. "Jadi punya jalur baru mereka" kata dia.

Menurutnya mudah saja menjadikan Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian. Rekayasa lalu lintas juga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Namun, tanpa adanya dukungan infrastruktur, petugas lapangan yang akan kewalahan. "Makanya ketersediaan kantong parkir sangat penting."

#### Sumbu Filosofis

Pemerhati Kawasan Malioboro, Ahmad Haris Zubair mengungkapkan filosofi sumbu linier Malioboro bisa dikenalkan lewat kehadiran kawasan pedestrian. Ketika kawasan itu ditetapkan menjadi sebuah kawasan cagar budaya, mestinya ada aturan lebih ketat. Baik dari sisi aturan arsitektur melainkan

dari sisi lainnya. "Dengan demikian, nantinya orang yang ada di jalur pedestrian selanjutnya bisa dikenalkan dengan filosofi jalan-jalan tersebut, lewat naskah-naskah, pengenalan sejarah, termasuk mengenalkan perihal sumbu filosofis," katanya.

Zubair mengungkapkan idealnya kebijakan pembangunan jalur pedestrian Malioboro, bukan hanya diperuntukkan bagi penggal Jalan Malioboro saja, melainkan juga Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro (dari rel kereta sampai toko Terang Bulan) dan Jalan Margo Mulyo (dari toko Terang Bulan hingga Titik Nol). Atau setidaknya, meliputi Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Karena Jalan Margo Utomo tertutup rel kereta api, kecuali bila rel tersebut dinonaktifkan atau dibuat berada di bawah jalan (konsep *underpass*).

Sebetulnya, rencana jalur pedestrian tidak mudah penerapannya karena hanya berlaku untuk penggal Jalan Malioboro saja. Kecuali ketika konsep jalur pedestrian melibatkan Jalan Margo Mulyo.

Ia menambahkan kendati gagasan jalur pedestrian di kawasan itu dinilai positif, tetapi harus difasilitasi dengan parkir yang cukup dan tempat yang nyaman bagi masyarakat, sehingga Malioboro bukan hanya jadi pusat perbelanjaan.

Bahkan kalau perlu, di kawasan pedestrian ada *display* kerajinan dan hasil karya seni. Disertai juga menghadirkan tarian dan atraksi kesenian lain yang mendukung orang yang berada di jalur pedestrian itu menjadi nyaman. Karena menurut dia, harus diakui Malioboro sudah terlanjur menjadi ikon Kota Jogja bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Orang belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. "Bahkan kalau memungkinkan [jalur pedestrian] dari Tugu Jogja sampai Titik Nol, walau itu memang

terlalu panjang ya," ujarnya.

#### Kunjungan Wisatawan

Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM), Rudi Harto mengingatkan pemerintah agar sebelum kendaraan dilarang masuk Malioboro perlu dicarikan solusi manajemen trafiknya. Alasannya, dampak dari ditutupnya lalu lintas kendaraan justru menjadi beban di jalan-jalan penyangga.

"Ujung-ujungnya, bisa membuat ketidaknyamanan wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Penyediaan kantong-kantong parkir ini harus diperhatikan," katanya.

Rudi Harto berharap jangan sampai konsep tersebut malah merusak tingkat kenyamanan wisatawan karena kesulitan aksesnya. "Ini betul-betul direncanakan matang jangan sampai konsep ini merusak kunjungan wisatawan, enggan masuk karena kesulitan," kata Rudi.

Wisatawan yang mau ke suatu tempat tentu akan mencari parkir sedekat mungkin. Seperti halnya di kawasan Malioboro. Berbeda dengan wisatawan luar negeri yang biasa berjalan kaki. "Perlu edukasi karena masyarakat belum siap untuk berjalan jauh. Jika kebijakan tersebut belum memberi dampak kesejahteraan Malioboro baik ekonomi, kesejahteraan, harus ada evaluasi," ucapnya.

Ia juga khawatir justru kebijakan ini membuat kemacetan di sekitaran Malioboro, lantaran kantong-kantong parkir belum siap. Termasuk akses para pedagang di sana perlu ada kebijakan khusus. Namun pada prinsipnya, karena ini kebijakan yang baru akan diterapkan ia masih menunggu.

Diharapkan juga pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya untuk memutuskan, tidak sekadar membuat bebas kendaraan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005